

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam menunjang penelitian ini, peneliti mengkaji terlebih dahulu riset-riset yang sudah dilakukan yang berhubungan dengan tema dan topik mengenai konflik Rusia dan Ukraina tahun 2022. Riset-riset sebelum itu jadi studi pustaka untuk melakukan riset lebih mendalam terhadap komponen-komponen yang ingin diteliti. Oleh karena itu peneliti mengambil 4 tinjauan pustaka yang telah disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, artikel oleh Grace Frestisa Irena Hutabarat oleh judul, *Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest* dalam Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol. 03 No. 03 Oktober 2022.<sup>14</sup> Hasil dari riset ini adalah Indonesia sebagai bangsa yang menggunakan prinsip bebas aktif menerapkan kebijakan bebas aktifnya dalam konflik internasional kemudian dari itu Indonesia bebas menetapkan perilaku serta tidak mengharuskan diri pada kekuatan khusus.

Ini menyiratkan bahwa Indonesia tidak berpihak pada satu pihak dengan Rusia atau Ukraina. Indonesia berupaya untuk mengurangi dampak yang buruk dengan tindakan pendekatan personal *soft power* yaitu misalnya pada kemerosotan ekspor-impor, meningkatnya harga, darurat pangan serta bahaya keamanan internasional. Ini bermaksud menganjurkan penuntasan serta inovasi baru serta menawarkan menjadi negosiator dalam menemukan titik terang. Pertikaian Rusia dan Ukraina pada tahun 2022, menjadi pandangan internasional karena imbas buruknya yang memengaruhi berbagai aspek seperti perdagangan internasional. Salah satu negara yang berimbas ialah Indonesia, maka dari sisi

---

<sup>14</sup> Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN*, 2745, 5920.

kepentingan publiknya, Indonesia memberikan strategi internasional tersangkut permasalahan itu. Oleh karena itu, riset ini menganalisis bagaimana Indonesia bergantung pada strategi internasionalnya dalam mengakhiri pertempuran Rusia dan Ukraina. Dalam artikel ini memakai teori politik luar negeri serta teori kepentingan nasional oleh konsep kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Yang jadi perbedaan riset ini ialah fokus permasalahan yang hendak diteliti. Riset ini lebih fokus oleh “Bagaimana upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan invasi Rusia serta Ukraina tahun 2022”.

Kedua, artikel oleh Dinda Tulus Tiara dan Syasya Yuania Fadila Mas'udi dengan judul, *Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power* dalam *Journal of Political Issues* Vol. 4 No. 2 Tahun 2023.<sup>15</sup> Hasil dalam penelitian ini adalah pertikaian Rusia dan Ukraina menuai akibat buruk ke stabilitas global yang membuat krisis di beberapa negara. Keadaan permasalahan yang belum usai, menyebabkan Indonesia berinisiatif mengakhiri penyerangan lewat Jokowi yang melaksanakan kunjungan ke Ukraina serta Rusia, menjadi penghubung komunikasi kedua negara.

Indonesia menggunakan instrumen diplomasi *first track* dalam mengakhiri pertikaian Rusia dan Ukraina, yang tampak dari implementasi perundingan serta kolaborasi antar negara yang jadi upaya peluang mendamaikan antar negara. Tidak hanya itu, dibalik upaya itu Indonesia mempunyai kepentingan ekonomi, mewujudkan citra positif, serta mensukseskan agenda KTT G20. Kasus tersebut akhirnya menjadi tujuan dari *Soft Power* Indonesia yaitu memajukan keamanan dunia dengan memproyeksikan citra negara yang positif dengan menggunakan *Soft Resource* nya selaku pimpinan KTT G20.

Yang jadi perbedaan riset ini ialah fokus permasalahan yang hendak diteliti dan jenis konsep yang dipakai. Riset ini lebih fokus oleh “Bagaimana aksi diplomasi Pemerintah Indonesia dalam mengakhiri pertempuran Rusia serta

---

<sup>15</sup> Tiara, D. T., & Mas' udi, S. Y. F. (2023). Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power. *Journal of Political Issues*, 4(2), 74-88.

Ukraina tahun 2022” serta riset ini memakai Teori Politik Luar Negeri serta Konsep Diplomasi.

Ketiga, artikel oleh Saryono, Aulia Fajarianti, Lia Dahlia Kurniawati, Ainun Alfasari Akbariah, Ibnu Abdul Jabar, Fitri Yulyanti oleh judul, *Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina* dalam *Jurnal Citizenship Virtues* Vol. 2 No. 2 Tahun 2022. Hasil dari riset ini ialah Operasi militer Rusia ke Ukraina semenjak 24 Februari 2022 telah menuai dampak negatif besar seperti memakan banyak korban jiwa, kerusakan bermacam sarana umum, menyurutkan ekonomi beberapa negara, dan membahayakan kedudukan negara yang lain yang turut menyerukan dan memberikan desakan *power* militer terhadap Ukraina.

Pertikaian Rusia terhadap Ukraina ini didasari sebab kekecewaan Rusia karena kemauan Ukraina berhimpun ke NATO yaitu persatuan militer koalisi Barat semenjak perang besar kedua. Saat ini, NATO tidak lagi terdiri dari negara-negara koalisi barat tetapi semua negara di Eropa. Indonesia sebagai pendamping kedua negara dengan standar politiknya yang bebas dan dinamis berperan sebagai perantara untuk mendamaikan di antara dua negara itu. Berdasarkan dari hasil riset, Indonesia seharusnya tidak membiarkan negara lain mengatur pengaturan upaya politik yang bebasnya serta menetapkan keamanan dan solidaritas publik.

Yang jadi perbedaan antara artikel ini ialah oleh fokus konflik yang hendak diteliti dan jenis konsep yang dipakai. Riset ini lebih fokus oleh “Bagaimana upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan Rusia serta Ukraina tahun 2022” serta riset ini memakai Teori Politik Luar Negeri serta Konsep Diplomasi.

Keempat, artikel oleh Syahbuddin dan Tati Haryati dalam judul, *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia* dalam *Jurnal Pendidikan IPS* Vol. 12 No. 1, Juni 2022. Hasil dari riset ini adalah menerangkan jika pertikaian antara Ukraina serta Rusia telah terjadi dari tahun 1991. Sudah selesainya Uni Soviet, Ukraina enggan dominasi Rusia dalam *Commonwealth of Independent States* (CIS) maupun Eropa Timur dan memutuskan berhimpun dengan Uni Eropa (UE).

Pertikaian antara Ukraina serta Rusia akhirnya itu bersinambung pada tahun 2013 yang dimulai darurat ekonomi Ukraina serta pemberhentian Yanukovych yang pro Rusia dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh presiden yang pro Barat-NATO. Akibat ini menuai beberapa wilayah yang pro Rusia seperti Luhank, Doneks dan Crimea yang mulai bergerak dan memberitahukan diri berhimpun dengan Rusia. Presiden Vladimir Putin menganggap terancam dalam aspek ekonomi, politik maupun militer seandainya Ukraina berhimpun bersama Barat-NATO. Presiden Rusia itu memberikan proposal jaminan yang mengikat secara hukum jika aliansi militer NATO hendak membubarkan kegiatan militer apa pun di Eropa Timur dan Ukraina. Saran tersebut ditolak oleh AS. Atas penolakan tersebut, Presiden Vladimir Putin pada tanggal 24 Februari 2022 memberitahukan jika Rusia telah menetapkan untuk melakukan operasi militer di Ukraina Timur.<sup>16</sup>

Yang jadi perbedaan antara artikel ini yaitu terletak oleh fokus permasalahan yang hendak diteliti dan jenis konsep yang dipakai. Riset ini lebih fokus oleh “Bagaimana aksi diplomasi Pemerintah Indonesia dalam mengakhiri penyerangan Rusia terhadap Ukraina tahun 2022” serta riset ini memakai Teori Politik Luar Negeri serta Konsep Diplomasi.

## **2.2 Landasan Teori**

Sejumlah teori digunakan untuk mengkaji bagaimana peranan Indonesia dalam menangani perang Rusia dan Ukraina. Peneliti akan membahas teori dan konsep politik luar negeri dan diplomasi.

### **2.2.1 Politik Luar Negeri**

Menurut Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin pengertian politik luar negeri ialah bahwa tindakan otoritas politik independen adalah karena dicadangkan untuk negara berdaulat. Misalnya Pemerintah Kanada, Jerman atau Spanyol adalah penjaga hukum kedaulatan negara mereka dan dari kepribadian internasional negara mereka masing-masing. Oleh karena itu, negara bagian

---

<sup>16</sup> Syahbuddin, S., & Haryati, T. (2022). Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia. *Jurnal Pendidikan Ips*, 12(1), 39-48.

seperti Quebec, Bavaria atau Catalonia tidak menjalankan kebijakan luar negeri. Mereka bisa menerapkan hubungan internasional oleh yurisdiksi konstitusional mereka, tetapi mereka tidak bisa melakukan kebijakan luar negeri di kancan internasional karena mereka bukan entitas yang berdaulat dan independen. Tentu saja, ada pengecualian di Belgia, misalnya, federalisme cukup terdesentralisasi dan memberikan beberapa yurisdiksi konstitusional eksklusif kepada Wallonia dan Flanders serta hak untuk menandatangani perjanjian hukum internasional di yurisdiksi mereka.

Definisi lainnya menurut Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin tentang kebijakan luar negeri ialah juga mengacu pada tindakan atau aturan yang mengatur tindakan karena pengertian kebijakan bersifat polisemi. Beberapa sarjana menganggap bahwa kebijakan luar negeri terdiri dari tindakan, reaksi atau yang mungkin ad hoc atau berulang. Contohnya adalah keputusan Prancis untuk menarik diri dari negosiasi Perjanjian Multilateral tentang Investasi pada tahun 1998, atau praktik pemberian bantuan darurat yang berulang kali kepada negara tetangga jika terjadi bencana alam besar.<sup>17</sup>

Sementara itu bagi Perwita serta Yani definisi lain politik luar negeri (*foreign policy*) adalah garis haluan negara dalam berhubungan dengan negara lain bersumber pada nilai, perilaku, arah dan target dalam mempertahankan, melindungi serta memajukan kepentingan nasional negara tersebut di dalam kancan internasional. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki kebijakan serta garis haluan politik luar negeri sendiri terhadap tujuan nasional masing-masing negara. Politik luar negeri ialah fitur yang dipergunakan dalam melindungi ataupun memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, lewat garis haluan maupun rencana oleh para pengambil kebijakan.<sup>18</sup> Bagi Yumetri politik luar negeri ialah kebijakan, perilaku, serta tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh negara dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain, baik

---

<sup>17</sup> Morin, J. F., & Paquin, J. (2018). *Foreign policy analysis: A toolbox*. Switzerland : Palgrave Macmillan. Springer. Hlm 03

<sup>18</sup> Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlm 48-49

oleh organisasi internasional serta subjek hukum internasional yang lain dengan tujuan meraih kepentingan negara. Politik luar negeri bisa jadi pedoman untuk suatu negara dalam melakukan aksi yang hendak dikerjakannya bila berhubungan dengan negara lain, supaya tujuan nasional negaranya bisa diraih.<sup>19</sup>

Bagi Rosenau politik luar negeri adalah salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Politik luar negeri ialah studi yang kompleks sebab tidak hanya mengaitkan aspek-aspek eksternal namun pula aspek-aspek internal negara. Negara selaku aktor yang menerapkan politik luar negeri, senantiasa jadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, walaupun aktor-aktor non-negara senantiasa menjadi memainkan kedudukan pentingnya dalam hubungan internasional. Kemudian bagi Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri sesuatu negara maka kita hendak merambah fenomena yang luas serta kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) serta kebutuhan eksternal (*eksternal needs*) tercantum didalamnya ialah semacam aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi serta kegiatan rutin yang diperuntukkan menggapai serta memelihara identitas sosial, hukum, serta geografi sesuatu negara.<sup>20</sup>

Tidak hanya itu bagi Rosenau, penafsiran kebijakan luar negeri adalah usaha sesuatu negara lewat keseluruhan perilaku serta kegiatannya dalam menanggulangi serta mendapatkan keuntungan dari area eksternalnya.<sup>21</sup> Kebijakan luar negeri baginya diperuntukkan memelihara serta mempertahankan kelangsungan hidup sesuatu negara.<sup>22</sup>

Lebih lanjut bagi Rosenau dalam bukunya yang bertema "*The Scientific Study of Foreign Policy*" memaparkan dalam kajian politik luar negeri yaitu selaku sesuatu sistem, dorongan dari area eksternal serta dalam negeri selaku input yang pengaruhi politik luar negeri sesuatu negara ditanggapi oleh para pembentuk pengesahan dalam proses konversi jadi output. Proses konversi yang

---

<sup>19</sup> Yumetri Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: UNAS PRESS. Hlm 04

<sup>20</sup> James, N. R., Boyd, G., & Thompson, K. W. (1976). *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press. Hlm 15

<sup>21</sup> Ibid hlm 27

<sup>22</sup> Ibid hlm 32

berlangsung dalam pembuatan politik luar negeri ini mengarah oleh pemaknaan kondisi, baik yang terjadi dalam area eksternal ataupun internal oleh memperhitungkan tujuan yang hendak diraih dan fasilitas, kapabilitas yang diperoleh.<sup>23</sup>

Strategi internasional bagi Rosenau benar-benar memanfaatkan siklus dimana tujuan negara direncanakan. Sasaran ini dipengaruhi oleh target yang ditampakkan oleh masa dahulu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan strategi internasional dipisahkan menjadi tujuan jangka panjang, jangka menengah dan sementara. Pada dasarnya, tujuan yang ditarik dari strategi internasional adalah untuk mencapai damai, keamanan dan kuasa.<sup>24</sup> Sedangkan bagi Holsti tujuan dalam kebijakan luar negeri ialah cerminan menimpa kondisi perkara di masa yang hendak tiba yang hendak dicetuskan pemerintah lewat pembentuk ketetapan. Triknya dengan melancarkan pengaruh di luar negeri serta mengganti ataupun mempertahankan sikap negara lain. Sesuatu pemerintahan pada umumnya berupaya menciptakan tujuan nasionalnya lewat bermacam metode yang bervariasi antara negara dengan yang lainnya, yang direfleksikan antara lain lewat pembuatan kebijakan luar negerinya. Sebab itu bagi Holsti, tujuan kebijakan luar negeri sesuatu negara wajib bersifat spesifik serta pastinya wajib dicocokkan oleh kebutuhan negara tersebut.<sup>25</sup>

K.J. Holsti membagikan tiga kriteria dalam mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, ialah:

- Nilai (*values*) yaitu jadi tujuan dari para pembentuk ketetapan
- Jangka waktu yang diperlukan dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan. Terdapat tujuan jangka pendek (*short term*), jangka menengah (*middle term*), serta jangka panjang (*long term*).

---

<sup>23</sup> Rosenau, J.N. (1980). *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press. Hlm . 171-173.

<sup>24</sup> Rosenau, J. N. (1969). *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press. Hlm 167

<sup>25</sup> Holsti, K. J. (1988). *International Politics a Framework for Analysis, Fifth Edition*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Hlm 92

➤ Tipe tuntutan yang diajukan suatu Negara kepada Negara lain.<sup>26</sup>

Sementara itu, Plano mengatakan bahwa setiap strategi internasional dirumuskan untuk mencapai tujuan publik. Tujuan publik yang akan dicapai melalui strategi internasional adalah rencana substansial dan direncanakan dengan menghubungkan kepentingan publik dengan keadaan di seluruh dunia yang terjadi dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk mencengkeram mereka. Tujuan direncanakan, dipilih, dan disahkan oleh pencipta strategi dan dikendalikan untuk mengubah pendekatan (strategi revisionis) atau mengikuti pengaturan (strategi norma) sehubungan dengan kenegaraan tertentu di bidang global.<sup>27</sup>

Langkah awal dari perumusan pembentukan kebijakan luar negeri meliputi:

- memaparkan perhitungan kepentingan publik ke dalam tujuan serta target yang rinci;
- menentukan faktor situasional di area dalam negeri serta internasional yang berhubungan dengan tujuan kebijakan luar negeri;
- menganalisis kapabilitas nasional dalam menjangkau hasil yang dirancang;
- meningkatkan perencanaan ataupun garis haluan dalam menciptakan kapabilitas nasional dalam mengatasi variable tertentu sehingga menggapai tujuan yang sudah ditentukan;
- melakukan aksi yang dibutuhkan;
- secara periodik meninjau serta melaksanakan penilaian pertumbuhan yang sudah terjadi dalam menjangkau tujuan ataupun hasil yang dirancang.<sup>28</sup>

Rosenau mengklasifikasikan faktor-faktor/sumber-sumber politik luar negeri lewat dua kontinum, sumber-sumber tersebut terdapat pada kontinum

---

<sup>26</sup> Russet, B., & Starr, H. (1988). *World Politics: the Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. freeman and Co. Hlm 190-193

<sup>27</sup> Plano, J. C., & Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin. Hlm 6

<sup>28</sup> Ibid hlm 05



waktu (*time continuum*) serta kontinum agregasi sistematis (*Systemic aggregation continuum*).<sup>29</sup>

Sumber-sumber utama yang jadi input dalam formulasi kebijakan luar negeri, adalah:

Sumber sistemik (*systemic sources*), ialah sumber yang bersumber dari area eksternal sesuatu negara. Sumber ini menerangkan struktur hubungan di antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang tercipta diantara negara-negara serta aspek situasional eksternal yang bisa berbentuk isu zona ataupun krisis. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar ialah jumlah negara besar yang turut andil dalam struktur hubungan internasional dan penggolongan kapabilitas di antara mereka. Sedangkan aspek situasional eksternal adalah stimulan seketika yang bersumber dari situasi internasional terakhir.

Sumber masyarakat (*societal sources*), adalah sumber yang berawal dari area internal. Sumber ini meliputi aspek kebudayaan serta sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial serta pergantian opini publik. Kebudayaan serta sejarah meliputi nilai, norma, tradisi, serta pengalaman dahulu yang melandasi hubungan antara anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi keahlian sesuatu negara dalam menggapai kesejahteraan. Perihal ini bisa melandasi kepentingan negara tersebut dalam berhubungan dengan negara lain. Struktur sosial meliputi sumber daya manusia yang dipunyai sesuatu negara ataupun seberapa besar permasalahan serta kentetraman internal dalam masyarakat. Opini publik pula bisa jadi aspek dimana penstudi bisa memandang pergantian sentimen masyarakat terhadap dunia luar.

Sumber pemerintahan (*governmental sources*), adalah sumber internal yang menerangkan tentang pertanggungjawaban politik serta struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik semacam pemilu, kontestasi partai serta tingkatan keahlian dimana pembentuk ketentuan bisa secara fleksibel mereaksi situasi eksternal. Dari struktur kepemimpinan dari bermacam kelompok serta individu yang ada dalam pemerintahan.

---

<sup>29</sup> James, N. R., Boyd, G., & Thompson, K. W. (1976). *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press. Hlm 18

Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), ialah sumber internal yang memandang nilai-nilai pengalaman, keterampilan dan karakter elit politik yang pengaruhi anggapan, kalkulasi, serta sikap mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercantum pula anggapan seorang elit politik tentang kondisi alamiah dari arena internasional serta tujuan nasional yang hendak diraih.<sup>30</sup>

Tidak hanya keempat sumber kebijakan luar negeri di atas, tercantum pula aspek tingkatan wilayah negara serta ukuran jumlah penduduk, lokasi geografi, dan teknologi yang bisa ditempatkan pada sumber sistemik maupun masyarakat.<sup>31</sup>

Aksi-aksi kebijakan luar negeri pada dasarnya terdiri dari instrumen yang diterapkan selaku fitur tujuan kebijakan luar negeri yang diresmikan dalam garis haluan kebijakan luar negeri. Aksi kebijakan luar negeri ini bisa diperlainkan berlandaskan metode yang dipakai. Holsti mengelompokkan instrumen kebijakan luar negeri dalam lima kategori, yaitu: diplomasi, propaganda, ekonomi, intervensi, persenjataan, perang serta pengaruh politik.

#### 1. Instrumen Diplomasi

Diplomasi adalah suatu alat dalam politik luar negeri. Sebutan diplomasi tidak bisa dipisahkan dari politik luar negeri, kekuatan nasional, serta kepentingan publik. Dalam implementasinya, negosiasi jadi salah satu aspek yang bisa memastikan berhasil tidaknya diplomasi yang diterapkan oleh diplomat. Penulis beragumen jika dengan terdapatnya diplomasi yang diterapkan secara baik, sistem internasional akan stabil, kemudian permasalahan serta kekerasan terminimalisir. Tidak hanya itu, dengan terdapatnya penerapan diplomasi, negara-negara pula bisa menggapai kepentingannya. Diplomasi pada dasarnya hendak senantiasa hadapi pertumbuhan sebab sistem internasional yang bersifat dinamis terlebih lagi dengan terdapatnya fenomena internasional. Oleh karena itu negara wajib mempunyai atau mempersiapkan strategi, keahlian, serta kecakapan yang adaptif supaya terlaksana diplomasi dengan baik demi teraihnya kepentingan nasional negaranya.

#### 2. Instrumen Propaganda

---

<sup>30</sup> Ibid Hlm 15

<sup>31</sup> Ibid Hlm 18

Propaganda ialah upaya yang diatur dari sebagian perorangan maupun regu dalam membentuk, mengatur atau mengganti perilaku regu lain oleh memakai instrumen komunikasi mereka dengan iktikad pengaruhi.

### 3. Instrumen Ekonomi

Diplomasi ekonomi sesuatu negara umumnya diterapkan dalam memiliki tujuan politik luar negeri dengan aspek kebutuhan secara bijaksana serta menawarkan bonus ekonomi maupun mengancam dengan membagikan tekanan ekonomi. Tidak hanya itu diplomasi menerapkan instrumen ekonomi pula menghasilkan pengaruh maupun keterlibatan oleh sesuatu negara. Holsti mengelompokkan program bantuan luar negeri kedalam empat kategori, antara lain: bantuan militer, bantuan teknik, *grant*, program komoditi impor serta pinjaman pembangunan.

### 4. Instrumen Intervensi

Intervensi ialah salah satu pelaksanaan mencampuri persoalan internal sesuatu negara yang bermaksud memelihara dan mengganti suasana politik. Intervensi militer bagi Holsti dimaknai campur tangan oleh metode menyalurkan ekspedisi militer dalam mendukung sesuatu pemerintahan yang berkuasa atau menolong kelompok pemberontak.

## 2.2.2 Diplomasi

Diplomasi menurut Ernest Satow merupakan penggunaan pengetahuan/nalar serta kebijaksanaan untuk berperilaku sebagai lawan dari hubungan bantuan antara negara-negara, dalam beberapa kasus juga menjangkau hubungan antara otoritas publik, singkatnya dikatakan perilaku sebagai lawan dari komitmen/kewajiban antar negara untuk tujuan yang hubungan yang damai.<sup>32</sup> Sedangkan seperti yang ditunjukkan oleh Sumaryo Suryokusumo, diplomasi yaitu tindakan politik dan penting untuk aktivitas global yang biasanya memaksa dan kompleks, dengan mempersamai legislatif dan asosiasi global dalam meraih

---

<sup>32</sup> Satow, E. (1957). *Guide to Diplomacy Practice*. London, New York, Toronto: Longmans Green and Co. Hlm 01

kepentingan mereka, melalui organisasi.<sup>33</sup> Lalu menurut Panikkar, diplomasi sebagai analisis logis hubungan internasional selaku salah satu penggerak untuk memajukan bangsa, meningkatkan partisipasi, maupun menyebarkan pengaruh ke berbagai negara dalam meraih kepentingan nasional bagi masing-masing negara. Faktanya, diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan publik, sebab diplomasi penting untuk misi dalam meraih kepentingan publik suatu negara. Seperti yang diucapkan KM Panikkar dalam bukunya “*the principle and practice of diplomacy*”, diplomasi dalam kaitannya dengan isu-isu legislatif global adalah kekhususan yang menitikberatkan pada kepentingan suatu bangsa dalam hubungannya oleh bangsa yang berbeda.<sup>34</sup>

Lebih lanjut menurut S.L Roy dalam bukunya yang berjudul “*Diplomacy*” mengatakan, bahwa pengertian diplomasi adalah kebijaksanaan yang erat kaitannya dengan ikatan antar bangsa, ialah keahlian mendorong kepentingan suatu negara lewat perundingan dalam hubungan yang damai antar negara. Untuk negara mana pun, tujuan diplomasi adalah untuk melindungi peluang politik. Antaranya dengan memperkuat ikatan, menjaga ikatan yang erat dengan negara-negara dan melindungi dari negara-negara yang mengancam.

Kemudian pada saat itu, SL Roy juga memahami bahwa beberapa spesialis mengkaji, diplomasi adalah kesepakatan yang diupayakan untuk mencapai kepentingan publik dengan kegiatan strategis yang dilakukan untuk mengamankan dan mendorong kepentingan publik melalui sinergi tanpa mengganggu kepentingan publik negara lain dan itu adalah titik kebijaksanaan, juga bisa dianggap sebagai cara dalam menghindari penyerangan dalam mengakhiri perdebatan antar negara.<sup>35</sup> Dalam kebijaksanaan, itu menyiratkan tidak ada konflik atau pengakhiran melalui kebiadaban, suatu bangsa harus mengukur solidaritasnya terhadap para pesaingnya. Dengan kebijaksanaan yang cerdas, juga mencoba membatasi saingannya, dan itu berarti melemahkan musuh secara etis.

---

<sup>33</sup> Syahmin, A. K. (2008). *Hukum diplomatik dalam kerangka studi analisis*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 03

<sup>34</sup> Panikkar, K. M. (1995). “*The Principle and Practice Diplomacy*”, dalam “Diplomasi” diterjemahkan oleh Harwanto dan Misrawati. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 3

<sup>35</sup> Roy, S.L. (1995). “*Diplomacy*”, Diterjemahkan oleh Harwanto dan Misrawati. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 05

Pada saat yang sama, negara pula berupaya mendapatkan bantuan sebanyak mungkin dari negara lain sehingga tidak ada negara yang menentangnya. Sebuah negara besar perlu membangun citra positif terhadap dunia untuk melegitimasi sisi tindakannya.<sup>36</sup>

Selanjutnya menurut Ranny Emilia dari cermin mata kalangan idealis, diplomasi dilakukan untuk mencapai tujuan sesuatu yang melebihi pencapaian materi. Diplomasi berperan dalam memenangkan individu, secara signifikan mempengaruhi pandangan dan perilaku satu sama lain, sehingga masing-masing pihak perlu mencapai harmonisasi dan berharap pada kualitasnya. Memusatkan perhatian pada negara yang hidup berdampingan secara damai, karena itu dunia sebenarnya membutuhkan negosiator dengan kreativitas dan kelihaihan untuk menghentikan keinginan berperang yang jadi sebab akibat masalah dunia.<sup>37</sup>

Unsur-unsur diplomasi yaitu sebagai berikut:

- *Conversation*: Pelaku diplomasi kebanyakan bekerja sama dan berkoordinasi, dan permasalahan yang rumit membutuhkan kerja sama yang maksimal. Seni percakapan adalah alat yang penting dalam keterampilan diplomatik. Melibatkan kepentingan bersama dan rasa hormat dari para pihak, keinginan untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain, serta ketulusan, spontanitas, empati dan daya tanggap. Tindakan dan interaksi diplomatik khusus dapat menjadi bagian dari percakapan antara pihak atau menggunakan percakapan modus interaksi.
- *Negotiation*: Setiap negosiasi mengandung unsur kerja sama, ketika para pihak memiliki kepentingan atau perbedaan pendapat tetapi ingin mencari solusi yang saling menguntungkan. Fakta dari negosiasi berarti bahwa rekanan, terlepas dari perbedaan kepentingan mereka,<sup>38</sup> memiliki beberapa kerjasama yang bertujuan untuk menemukan titik terang. Dalam negosiasi, ada konsep dilema negosiator: entitas yang bernegosiasi selalu menghadapi pilihan untuk menjadi lebih kooperatif atau lebih perilaku kompetitif, atau menjadi lebih keras atau lebih lembut dalam hubungannya dengan pihaknya. Dalam diplomasi internasional, negosiasi adalah yang paling umum dan alami.

---

<sup>36</sup>Ibid hlm 08

<sup>37</sup>Emilia, R. (2013). *Praktek Diplomasi*. Jakarta: Baduose Media. Hlm 06

<sup>38</sup>Faizullaev, A. (2022). *Diplomacy for Professionals and Everyone*. Leiden, Boston: BRILL. Hlm 144

- *Dispute*: Diplomasi terkadang dapat menggunakan mode perselisihan interaksi dialogis dan bernegosiasi lebih umum. Perselisihan mungkin berbeda dalam tingkat konfrontasi dengan lawan dari perselisihan ringan yang berupa diskusi, hingga yang keras yaitu berubah menjadi perdebatan. Diskusi menyiratkan toleransi yang lebih besar dan yang lebih tinggi pandangan, sementara debat melibatkan tingkat tantangan dan kontestasi yang lebih besar. Oleh karena itu, diskusi lebih umum daripada debat di unsur para diplomat.<sup>39</sup> Namun, bahkan debat paling sengit dalam diplomasi mengandaikan beberapa bentuk kerjasama antar lawan.
- *Rhetoric*: Pidato, bercerita, menyajikan dan mengembangkan narasi, menulis surat dan artikel, dan bentuk retorika lainnya banyak digunakan dalam diplomasi. Namun, retorika dapat dianggap sebagai salah satu metode umum dialogis interaksi jika melibatkan keterbukaan, kemungkinan menerima umpan balik dan keinginan untuk mendengarkan pihak lain. Retorika adalah metode persuasif untuk mengerahkan pengaruh, dan dalam bentuk lisan dan tulisan, itu bisa menjadi bagian dari negosiasi dan perselisihan. Namun, retorika juga bisa monologis, yaitu satu sisi. Ahli retorika monologis tidak memiliki keinginan untuk mendengarkan pihak lain dan tujuan mereka hanyalah penerangan pengaruh sepihak penyampaian konstruksi wacana. Oleh karena itu, retorika dapat diubah menjadi modus kegiatan dasarnya kooperatif atau oposisi, tergantung pada tujuan ahli retorika.<sup>40</sup>

*Diplomasi bilateral* adalah prosedur operasional standar untuk perilaku hubungan internasional. Ini adalah prosedur *default* di mana hubungan antar negara sedang berlangsung dikelola. Bilateral mencerminkan prinsip inti diplomasi timbal balik, yang merupakan berdasarkan asas kesetaraan. Diplomasi bilateral memiliki satu keuntungan besar. Hubungan antara dua negara mana pun dapat dibuat khusus. Itu dapat langsung mengatasi spesifik kepentingan kedua negara yang terlibat dalam hubungan tersebut. Kedua negara secara penuh kontrol tidak ada negara lain yang mengabaikan mereka. Kendali penuh bukan berarti total kebebasan, bagaimanapun diplomasi bilateral harus mempertimbangkan regional dan konteks global di mana ia beroperasi. Tetap saja, lebih mudah menyelaraskan minat dan preferensi dua negara daripada ketika lebih banyak yang

---

<sup>39</sup> Ibid hlm 145

<sup>40</sup> Ibid hlm 146

terlibat. Akan tetapi diplomasi bilateral tidaklah selalu menguntungkan, biaya transaksi yang terlibat dalam membangun kedekatan hubungan bilateral karena ada pihak luar mungkin menjadi penghalang. Misalnya, itulah pasca Brexit telah mengalami. Ini juga menjelaskan mengapa negara bagian kecil dengan sumber daya terbatas tidak mampu melakukannya dengan cara bilateral. Efektivitas biaya adalah aset multilateralisme.

Bilateral adalah sesuatu yang berbeda dan tidak boleh disamakan dengan diplomasi multilateral seperti itu. Yang terakhir mengacu pada metode, cara melakukan hubungan internasional. Bilateral lebih dari sekadar pilihan metode tertentu, yaitu melibatkan politik pilihan tentang bagaimana mendekati hubungan internasional secara umum. Ada ideologis elemen yang berperan dalam bilateral. Menyebut seorang bilateral berarti berpolitik pernyataan. Bilateral telah mendapatkan daya tarik baru belakangan ini. Di dunia yang ditandai oleh persaingan, khususnya di antara kekuatan besar, negara kembali menyaksikan kebangkitan kembali negara berdaulat dan merdeka yang kuat, negara yang menonjolkan diri. Bilateral kemudian mempertanyakan “Tatanan Dunia Berbasis Aturan” yang muncul setelah Perang Dunia II dan hidup kembali pada awal 1990-an dengan berakhirnya Perang Dingin. Ketika pada Mei 2010 William Hague menjadi Menteri Luar Negeri Inggris yang baru, dia menggunakan Diplomasi Bilateral didasarkan pada premis bahwa apa yang dilakukan sendiri atau hanya dengan dua orang, satu tidak lebih baik. Mengelola hubungan secara bilateral kata Hague, tidak hanya lebih mudah tetapi jauh lebih efektif.

Dalam pendekatan bilateral tidak ada yang namanya *common denominator* terendah. Diketahui, contoh langkah serupa terjadi di AS ketika Donald Trump mengambil alih Barack Obama. Di hari pertamanya menjabat pada Februari 2017, Trump menandatangani perintah eksekutif yang membawa kolaborasi perdagangan 12 negara dan menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai *Trans Pacific Partnership* (TPP). Lainnya dari bilateral pengaturan atau organisasi yang mengikutinya yaitu kesepakatan Perubahan Iklim Paris 2015, Kesepakatan nuklir Iran 2015 yang dikenal sebagai JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, UNESCO, dan UNRWA

(*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*). Diplomasi bilateral sebagai metode doktrin, bentuk diplomasi berbasis negara dapat ditiru di aspek yang berbeda.<sup>41</sup>

***Diplomasi multilateral*** adalah secara sederhana kemudian mengacu pada cara melakukan kebijakan luar negeri, dikasus ini melalui interaksi diplomatik yang terkoordinasi antara tiga negara atau lebih. Negara-negara bertumpu pada premis bahwa kerjasama adalah strategi kemenangan. Diplomasi multilateral adalah kurang transaksional daripada diplomasi bilateral, pada akhirnya yang menegosiasi menawar dan membuat kesepakatan (apa untungnya bagi saya?), pada yang pertama negosiator bernegosiasi dan membuat perjanjian (apa untungnya itu untuk kita?). Pemahaman diplomasi multilateral semacam itu pada dasarnya bersifat prosedural, tentang negosiator bagaimana melakukan diplomasi yaitu cara dan metode, bukan apa dari diplomasi yaitu bentuk serta model. Globalisasi dan tumbuhnya saling ketergantungan antara negara telah menjadikan diplomasi multilateral sebagai alat yang berkembang. Organisasi internasional (PBB, Bretton Woods kembar IMF dan Bank Dunia), badan-badan khusus (WTO, ILO, WHO, IAEA), organisasi regional (UE, AU, ECOWAS, ASEAN), global konferensi (tentang Hukum Laut, tentang Perubahan Iklim), dan KTT yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (G7,G20), semuanya merupakan cara multilateral dalam melakukan diplomasi.

Multilateralisme, bagaimanapun adalah sesuatu yang lain. Sekarang negara tidak lagi berbicara tentang sekedar cara atau tata cara penyelenggaraan hubungan luar negeri. Seperti bilateral, multilateralisme adalah pernyataan politik. Ini melibatkan komitmen substantif untuk tatanan dunia tertentu. Berpijak pada nilai dan prinsip normatif, bukan sekedar kepentingan. Dialog dan kerja sama mengarah pada tindakan kolektif. Contoh multilateralisme seperti itu komitmennya adalah seperti Tatanan Dunia Baru George Bush di awal 1990-an atau saat ini Tatanan Dunia Berbasis Aturan yang dipertahankan oleh sebagian besar negara demokrasi liberal. Multilateralisme dalam pengertian ini bukan lagi

---

<sup>41</sup> Verbeke, J. (2022). *Diplomacy in Practice: A Critical Approach*. London & New York: Taylor & Francis. Hlm 36-37



terutama cara bertindak bersama-sama dengan pihak lain yaitu metode, tetapi lebih tentang berbagi dan mengamankan tujuan dan kepentingan yang bersama merupakan pandangan dunia politik, ideologi. Misalnya, itulah seperti salah satu dari pemikiran seorang diplomat yang merupakan Perwakilan Uni Eropa Tinggi ialah Javier Solana, dia meluncurkan konsep efektif multilateralisme dalam strategi keamanannya tahun 2003. Multilateralisme dalam pengertian substantif ini aksi otomatis bagi pihak asing seperti banyak negara Eropa yang melakukan kebijakan eksternalnya.<sup>42</sup>

Ide aktor diplomasi berasal dari ide diplomasi itu sendiri yaitu komunikasi interaksional. Aktor, tindakan dan interaksi dalam diplomasi tidak dapat dipisahkan, dan studi tentang aspek tersebut saling terkait. Seorang aktor dalam diplomasi adalah entitas yang secara dialogis berinteraksi dengan entitas lain dengan mengambil misi itikad baik. Untuk melakukannya, aktor perlu terlibat secara konstruktif dengan rekannya. Aktor diplomasi dapat berupa organisasi atau lembaga. Negara sebagai aktor diplomasi tampil sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional. Di antara pelaku diplomasi lainnya yaitu contohnya adalah organisasi pemerintah dan non pemerintah internasional, perusahaan transnasional, kelompok agama dan pemuda, asosiasi profesional, dan Partai-partai politik.

Terlepas dari masalah yaitu mengenai aktor diplomasi berinteraksi dengan entitas lain, pelaku diplomasi tetaplah dapat menggunakan diplomasinya dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, firma hukum sebagai organisasi atau lembaga yang mewakili organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta dapat menggunakan diplomasi dalam tindakan dan interaksi mereka dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan urusan hukum.<sup>43</sup> Negara sebagai aktor dapat menggunakan badan organisasi seperti Kementerian Luar Negeri dan diplomat profesional dalam hubungan mereka dengan negara dan organisasi lain.<sup>44</sup>

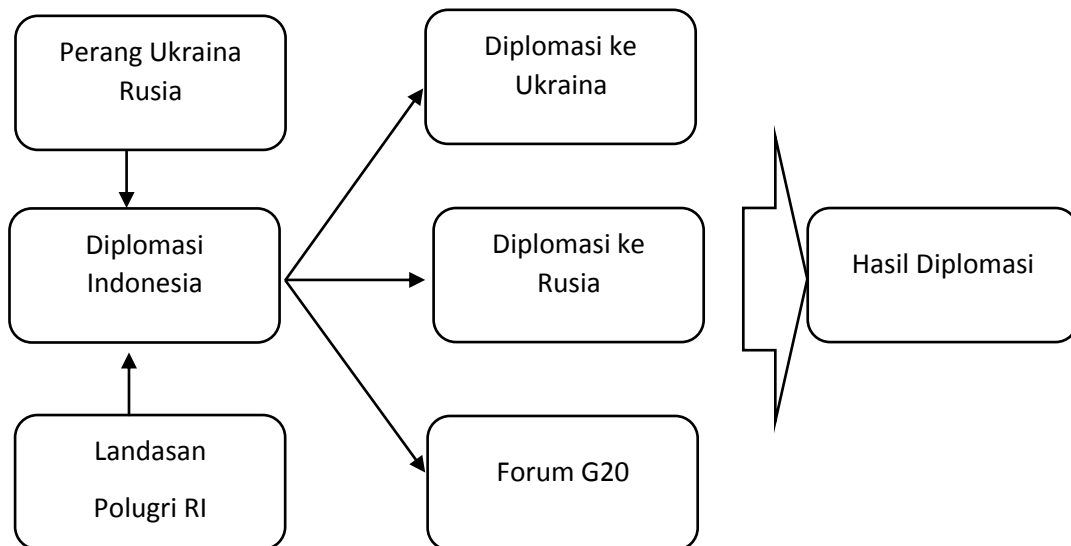
---

<sup>42</sup> Ibid hlm 37-38

<sup>43</sup> Faizullaev, A. (2022). *Diplomacy for Professionals and Everyone*. Leiden, Boston: BRILL. Hlm 68-69

<sup>44</sup> Ibid hlm 70-71

### 2.3 Kerangka Penelitian



Upaya Indonesia dalam mendamaikan antara Ukraina serta Rusia menggunakan instrumen perdamaian ialah berarti menghentikan konflik dan mewujudkan ketentraman dunia. Upaya Indonesia pula tersebar dengan pengembangan kekuatan Indonesia sendiri yang *soft power* seperti membangun citra positif, mengundang KTT G20 serta kepentingan keuangan. Meskipun terdapat kepentingan publik bagi Indonesia, hal ini tidak mengurangi kepentingan internasional yang dibawa oleh Indonesia, misalnya pemulihan moneter dunia dan *supply chain*. Indonesia dalam masalah pemerintahan global tidak sama dengan negara lain, karena Indonesia berpegang teguh pada strategi internasional yang bebas dan dinamis. Indonesia melibatkan instrumen bilateral sebagai upaya untuk mengakhiri invasi dengan berdialog bersama antara kedua negara, sehingga Indonesia bisa memastikan tercapainya tujuan serta kepentingan yang disampaikannya. Meskipun dapat digarisbawahi bahwa penekanan Indonesia ialah pada isu-isu yang kemanusiaan di mana isu-isu ini bersinggungan dengan isu-isu moneter sehingga mengandung unsur-unsur perencanaan keuangan baik secara dalam negeri, maupun global. Maka dari itu Indonesia memanfaatkan *soft resource* nya sebagai Presidensi G20 dan mengimplementasikan instrumen